

SKRIPSI

**URGENSI PELAKSANAAN PIDANA MATI (*DEATH PENALTY*)
DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas

OLEH:

FADHILAH YUSFA THORIQ

2210113022

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing :

Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LLM

Dr. Nani Mulyati, S.H, M.CL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

No.Reg: 47/PK-IV/IV/2026

LEMBAR PENGESAHAN
VALIDITY SHEET
No.Reg: 47/ PK-IV/IV/2026

URGENSI PELAKSANAAN PIDANA MATI (*DEATH PENALTY*) DALAM
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

*THE URGENCY OF CARRYING OUT THE DEATH PENALTY FOR
NARCOTICS OFFENSES IN INDONESIA*

Disusun Oleh
Author

FADHILAH YUSEFA THORIO
NIM : 2210113022

Program Kekhususan (PK) : Hukum Pidana (PK IV)
Concentration Program (CP): Criminal Law (CP IV)

Skripsi ini Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada tanggal 12
Agustus 2026 dan dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji Yang Terdiri Dari:
*This Minor Thesis Was Defended In the Comprehensive Examination Session on
August 12th, 2026 and Approved by a Team Of Examiners Consisting of:*

Dekan
Dean

Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.Hum.
NIP. 196807231993021001

Wakil Dekan 1
Vice Dean 1

Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL.
NIP. 198208092005012002

Pembimbing 1
Supervisor 1

Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 19621211989011002

Pembimbing 2
Supervisor 2

Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL.
NIP. 198208092005012002

Penguji 1
Examiner 1

Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum.
NIP. 196212051987022001

Penguji 2
Examiner 2

Felia Hermaventi, S.H., M.H.
NIP. 199812082024062001



No. Alumni Universitas

Fadhilah Yusfa Thoriq

No. Alumni Fakultas

a. Tempat/Tgl Lahir : Batam / 06 Januari 2004
 b. Nama Orang Tua : Pauzi, Yusmeihildawati
 c. Fakultas : Hukum
 d. PK : Hukum Pidana
 e. NIM : 2210113022

f. Tanggal Lulus : 12 Agustus 2026
 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian
 h. Lama Studi : 4 Tahun
 i. IPK : 3.77
 j. Alamat : Duta Plamo Residence,
 Batam, Kepulauan Riau

URGENSI PELAKSANAAN PIDANA MATI (*DEATH PENALTY*) DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

(Fadhilah Yusfa Thoriq, 2210113022, Hukum Pidana (PK-IV), Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 108 Halaman, 2026)

ABSTRAK

Tindak pidana narkotika telah berkembang menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengancam keselamatan dan keberlangsungan generasi bangsa Indonesia. Dalam kurun waktu 2020 hingga 2025, Badan Narkotika Nasional mencatat lebih dari 264.188 kasus pengedaran narkotika, sementara 326 terpidana telah dijatuhi vonis pidana mati. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua permasalahan utama, yaitu: pertama, perbandingan pengaturan pidana mati dalam tindak pidana narkotika antara Indonesia dan Singapura dan kedua, urgensi pelaksanaan pidana mati dalam tindak pidana narkotika di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan komparatif, perundang-undangan, dan konseptual, serta didukung oleh studi kepustakaan dan wawancara dengan pejabat Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan fundamental antara sistem pidana mati Indonesia dan Singapura. Indonesia melalui KUHP Nasional Nomor 1 Tahun 2023 mengonstruksikan pidana mati sebagai pidana bersyarat dengan masa percobaan sepuluh tahun, yang mencerminkan nilai kemanusiaan sekaligus membuka ruang pertimbangan individual akan tetapi juga menimbulkan penderitaan fisik dan psikis terhadap terpidana karena memiliki masa tunggu yang terlalu lama. Sebaliknya, Singapura menerapkan sistem pidana mati wajib (*mandatory*) berdasarkan *Misuse of Drugs Act* (MDA) 2023 dengan ambang batas kuantitas narkotika yang tegas, proses peradilan yang terstruktur, dan jeda waktu eksekusi yang singkat sehingga menghasilkan efek jera yang nyata. Selain itu pada rumusan masalah kedua urgensi pelaksanaan pidana mati dalam tindak pidana narkotika di Indonesia yang terdiri dari rasionalisasi darurat narkotika yang dihadapi oleh Indonesia dan Putusan mahkamah konstitusi yang memberikan landasan penguat dalam pelaksanaan pidana mati dalam tindak pidana narkotika di Indonesia. Terdapat kesenjangan antara norma dan pelaksanaan yang justru menjadi tolak ukur penguat bahwa pelaksanaan pidana mati narkotika di Indonesia sangat mendesak.

Kata Kunci : Pidana Mati, Narkotika, Urgensi, Indonesia, Singapura

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 12 Agustus 2026
 Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I	Penguji II
Fadhilah Yusfa Thoriq	Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum	Felia Hermayenti, S.H., M.H

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Pidana: Riki Afrizal, S.H., M.H

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

	No. Alumni University	Fadhilah Yusfa Thoriq	No. Alumni Faculty
	a. Place/ Date of Birth : Batam/ January 6 th 2004 b. Parent Name : Pauzi, Yuscmeihildawati c. Faculty : Law d. Concentration : Criminal law e. NIM : 2210113022		f. Graduation Date : August 12, 2026 g. Pass Predicate : Cumlaude h. Length Of Study : 4 Years i. GPA : 3.77 j. Address : Duta Plamo Residence, Batam, Kepulauan Riau

THE URGENCY OF CARRYING OUT THE DEATH PENALTY FOR NARCOTICS OFFENSES IN INDONESIA

(Fadhilah Yusfa Thoriq, 2210113022, Criminal law (PK-IV), Faculty of Law, Andalas University, 108 pages, 2026)

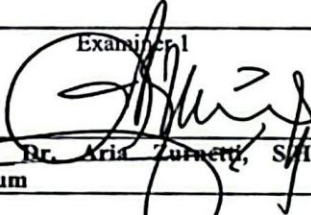
ABSTRACT

Narcotics-related offenses have evolved into "extraordinary crimes" that threaten the safety and future of Indonesia's younger generation. Between 2020 and 2025, the National Narcotics Agency (BNN) recorded over 264,188 cases of narcotics trafficking, while 326 convicts were sentenced to death. This study examines two primary issues: first, a comparison of death penalty regulations for narcotics offenses between Indonesia and Singapore; and second, the urgency of carrying out the death penalty for such offenses in Indonesia. The study employs a normative-juridical method utilizing comparative, statutory, and conceptual approaches, supported by literature reviews and interviews with officials from the West Sumatra High Prosecutor's Office. The findings reveal fundamental differences between the death penalty systems of Indonesia and Singapore. Through the National Criminal Code (Law No. 1 of 2023), Indonesia frames the death penalty as a conditional sentence involving a ten-year probationary period; while this reflects humanitarian values and allows for individualized consideration, it also inflicts physical and psychological suffering on the convict due to the excessively long waiting period. Conversely, Singapore implements a mandatory death penalty system under the Misuse of Drugs Act (MDA) 2023, characterized by strict narcotics quantity thresholds, a structured judicial process, and a short interval before execution, thereby creating a tangible deterrent effect. Regarding the second issue—the urgency of execution—the study highlights the rationale based on the narcotics emergency facing Indonesia and Constitutional Court rulings that provide a reinforcing legal basis for carrying out the death penalty for narcotics offenses. The gap between legal norms and actual implementation serves as a compelling indicator that the execution of the death penalty for narcotics offenses in Indonesia is a matter of great urgency. .

Keywords: Death Penalty, Narcotics, Urgency, Indonesia, Singapore

This Minor Thesis has been successfully defended and regarded to graduate by August 12th 2026.

Examiner,

Signature	Examiner I	Examiner II
		
Fadhilah Yusfa Thoriq	Prof. Dr. Aria Zulmaeni, S.H., M.Hum	Felia Hermayenti, S.H., M.H

Acquainted,

Head of the Department of Criminal Law : Riki Afrizal, S.H., M.H


Signature

Alumni has been registered in the Faculty/University under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature:

